

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DI  
KAWASAN PERDAGANGAN PASAR RAYA  
SOLOK BERDASARKAN PERATURAN  
WALIKOTA SOLOK NOMOR  
7 TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

*Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1)  
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH:**

**SYAFRIANTI**  
**NIM. 11527203051**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIFKASIM  
PEKANBARU-RIAU  
1441 H/2019**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DI KAWASAN PERDAGANGAN PASAR RAYA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2018.**

Ditulis Oleh : Syafrianti  
Nim : 11527203051  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosah pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2019  
Pembimbing Skripsi

  
Basir, S.H., MH

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**BASIR, S.HI, MH**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Oktober 2019

No : Nota Dinas

Tempat : -

Tujuan : Pengajuan Skripsi

Sdri. SYAFRIANTI

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara SYAFRIANTI, yang berjudul "Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Di Kawasan Perdagangan Pasar Raya Solok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing

**BASIR, S.HI, MH**





## PENGESAHAN

Sketsa dengan judul, "Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Dikawasan Perdagangan Pasar Raya Solok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018" yang ditulis oleh :

Nama : SYAFRIANTI  
NIM : 11527203051  
Program Studi: ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 November 2019  
Waktu : Jam, 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

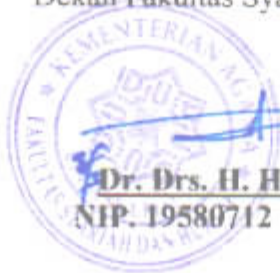
Ketua  
Erdaus, SH. MH

Sekretaris  
Iham Asbar, SH., MH

Penguji  
Nurhidayat, SH., MH

Penguji  
Asril, S.H., MH

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta ini dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Site of Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **“Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Di Kawasan Perdagangan Pasar Raya Solok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018”**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai kawasan perdagangan khusus nya Pasar Raya Solok adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisonal, pertokoan, mall, plaza maupun sebutan lainnya. Raminya pedagang dikawasan Pasar Raya Solok tidak terlepas juga dari banyaknya jumlah toko atau ruko yang bertebaran di Pasar Raya Solok dengan menyediakan jenis dagangan yang beragam, dalam pasal 3 ayat 4 Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penatataan Bangunan Teras Dan Kanopi Dikawasan Perdagangan telah dilarang memanfaatkan bangunan kanopi untuk berjualan dan menempatkan barang dagangan. Pada kenyataannya pemilik toko masih banyak berjualan dan menempatkan barang daganganya di bawah bangunan kanopi yang mana hal tersebut mengakibatkan terganggunya hak para pejalan kaki, tidak terciptanya ketertiban, kenyamanan, keindahan tata ruang kota dan estetika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan. Dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *penelitian hukum sosiologis*, lokasi penelitian ini dilakukan kawasan perdagangan Pasar Raya Solok jalan Datuak Parpatih Nan Sabatang, Kelurahan Ps. Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, Dengan Subjek penelitian Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bidang pasar Kota Solok, Satuan Polisi Pamong praja Kota Solok. Dengan Populasi 112 orang dan Sampel sebanyak 19 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian data primer, data sekunder, dan data tersier dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah *metode deduktif*.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan Pasar Raya Solok belum berjalan dengan optimal karena para pedagang yang memiliki bangunan teras dan kanopi masih melanggar Peraturan Walikota solok dan hingga saat ini belum ada dilakukan pembongkaran terhadap penyalahgunaan fungsi bangunan teras dan kanopi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu: kurangnya kepatuhan pedagang yang berjualan dipasar Raya Solok terhadap Peraturan Walikota, kurangnya sosialisasi Peraturan Walikota ini kepada para pedagang, faktor ekonomi, relasi pedagang dengan pejabat pemerintah yang menyebabkan dalam pelaksanaan peraturan Walikota ini penertiban teras dan kanopi di pasar Raya Solok tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T karena dengan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad S.A.W, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat sekarang ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ **Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Dikawasan Perdagangan Pasar Raya Solok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018** ”. Ini merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda Risman Rajo Sutan dan Ibunda tercinta Endrawati yang selalu mencintai dan menyayangi penulis sepenuh jiwa dan raganya, dan motivator yang luar biasa bagi Ananda yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan Ananda baik secara moril maupun materil, dan Adinda Dewi Susanti yang penulis sayangi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag., M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL , Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin S.Ag., M.Ag, Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A.
4. Bapak Firdaus, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus penasehat akademik dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH, M.Hum yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Basir, S.HI, MH selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Drs. Arwan, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Sultan Syarif serta Pegawai yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis
7. Bapak dan Ibu dosen serta semua civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan dan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Drs. Dedi Asmar selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Solok Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
  9. Bapak Drs. Ori Afillo selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Solok yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
  10. Sahabatku Amelianti SH, Dino, Norhikmah, Riska Mardalena, Siska SH, Susmita SH, dan Sandi yang selalu setia menemani saat penulis membutuhkan bantuan, arahan dan motivasi, serta teman-teman yang selalu menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
  11. Seluruh teman-teman IH dan HTN terutama IH E dan HTN B angkatan 2015, BEM FASIH 2015, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
- Akhirnya kepada Allah SWT jualah segala kemuliaan dan kebesaran, serta selalu berserah diri kepada-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat membantu bagi yang membutuhkan. Aamiin.

Pekanbaru, 27 September 2019

Penulis

Syafrianti



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>16</b>
A. Kondisi geografis Kota Solok .....	16
B. Profil Satuan polisi Pamong Praja kota Solok .....	24
C. Struktur Organisasi.....	30
D. Profil dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Solok.....	31
E. Kewenangan dan data umum Organisasi .....	33
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
A. Pelaksanaan Kebijakan Publik .....	43
B. Bangunan Teras dan Kanopi.....	45
C. Pengertian Penataan .....	46
D. Peraturan Yang Mengatur .....	46
E. Otonomi Daerah .....	49
F. Tata Ruang Dan Estetika.....	52
G. Pengelolaan Pasar.....	54



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi dikawasan Perdagnagan .....	57
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Walikota Solok nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL

tabel 1.1	Populasi Dan Sampel .....	10
tabel 2.1	Kondisi Penduduk Kota Solok .....	20
tabel 2.2	Penduduk Laki Dan Perempuan Kota Solok Berdasarkan Umur .....	21
tabel 2.3	Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Solok .....	25



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa:

“Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.”<sup>2</sup>

Pemerintah daerah juga berhak untuk menegeluarkan sebuah peraturan daerah serta menetapkan peraturan daerah yang telah telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.<sup>3</sup> Ini dikarenakan, kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah.<sup>4</sup>

Desentralisasi mencakup di pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk membuat peraturan dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi berdasarkan sistem perwakilan daerah, jadi yang dimaksud dengan azas desentralisasi adalah azas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Cristine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 130

<sup>2</sup> Abu Samah, *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru, 2016), h.

26

<sup>3</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2012), h. 104

<sup>4</sup> Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah*, (Jurnal Ilmu Hukum, volume. 10, 2014), h. 21





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. sedangkan azas dekonsentrasi adalah azas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di Daerah. Azas selanjutnya adalah azas tugas pembantuan yaitu azas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang member tugas. Dengan demikian, desentralisasi idealnya berbasis komunitas masyarakat. Daerah otonom tidak mungkin terbentuk jika tidak terdapat jalinan ikatan politis antara masyarakat dan wilayah tempat tinggal nya. Sebagai bentuk dari aktualisasi politik masyarakat<sup>5</sup>

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala provinsi maupun kabupaten atau kota, dalam ranah penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah.<sup>6</sup> Sedangkan peraturan walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD kota.

Pemerintahan Walikota Solok telah mengeluarkan sebuah Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi

<sup>5</sup>Fachruddin, *Membangun Otonomi Daerah NKRI*, (Jakarta: Serat Alam Media, 2016), h.

<sup>6</sup>Maria Farida S, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Cet. Ke-7, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kawasan Perdagangan Pasar Raya Solok, yang dimaksud dengan bangunan itu sendiri adalah sebagai tempat manusia melakukan kegiatan baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan agama, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2017 tentang Penataan bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan Pasal 1 “Kanopi adalah bagian pelengkap bangunan yang merupakan bagian konstruksi bangunan utama yang terdapat di bagian depan dan samping bangunan yang terbuat dari bahan kayu, besi dan sejenisnya dan memiliki penutup dibagian atas (atap).”<sup>7</sup>

Peraturan Walikota Solok Dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan dan penertiban bangunan teras dan kanopi di kawasan perdagangan agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu mengatur penataan bangunan teras dan kanopi di kawasan perdagangan yang sesuai dengan perencanaan kota. rencana umum tata ruang perkotaan adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota, yang berisikan rencana pembangunan kota yang terkait dengan ruang, sehingga tercapai tata ruang yang dituju dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang.<sup>8</sup> Peran serta masyarakat dalam penataan ruang merupakan salah satu faktor penting guna mengeliminasi, setidaknya mengurangi potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Menurut hardjasoemantri, masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Solok Nomor 13 tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan

<sup>8</sup> Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 69

<sup>9</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 221



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “penataan teras dan kanopi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menata teras bangunan dan kanopi bertiang pada pertokoan dan atau bangunan lainnya dikawasan perdagangan, yang meliputi penyesuaian tampilan konstruksi bangunan teras dan kanopi bertiang, penindakan pemotongan dan pembongkaran bangunan teras dan kanopi bertiang.”<sup>10</sup>

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam kehidupan sehari-hari keberadaan pasar sangatlah penting. Hal inidi karenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh dipasar. Sedangkan kawasan atau zona perdagangan adalah batasan-batasan ruang tertentu sesuai dengan pemanfaatan ruang yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan perdagangan.<sup>11</sup> Sosiologi pasar dimengerti sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan pasar dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pasar. Juga sebaliknya bagaimana, bagaimana pasar mempengaruhi masyarakat. Hubungan dilihat dari sisi saling mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal objektif akan

<sup>10</sup> Peraturan Walikota Solok Nomor 13 tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan

<sup>11</sup> Ferninda Arlisa Widyasari, analisis strategi pengelolaan pasar tradisional (jurnal ilmu sosial dan ilmu politik volume 5, 2016), h. 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuntun individu dalam melakukan kegiatan pasar seperti apa yang diperbolehkan tuntutan tersebut biasanya berasal dari budaya dan hukum.<sup>12</sup>

Kawasan perdagangan khususnya Pasar Raya Solok yang terletak di jalan Datuk Perpatih Nan Sabatang adalah telah berdiri khusus untuk bangunan teras dan kanopi. Pasar raya solok adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Ramainya Pedagang dikawasan Pasar Raya Solok tidak terlepas juga dari banyaknya jumlah toko hingga ruko yang bertebaran di Pasar Raya Solok dengan menyediakan jenis dagangan yang beragam seperti sandang, pangan, bahan bangunan, obat-obatan elektronik, buku, emas, hingga jasa dan lain sebagainya. Dari sekian banyaknya bangunan pertokoan dan ruko Dikawasan Pasar Raya Kota Solok Dilengkapi Dengan Pemasangan Kanopi.

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Dikawasan Perdagangan menyatakan bahwa: *“bangunan kanopi tidak dibenarkan untuk dimanfaatkan sebagai bangunan tambahan, tempat berjualan dan atau menempatkan barang dagangannya.”*<sup>13</sup> Masyarakat juga berhak melaporkan kepada pemerintah daerah terhadap bangunan gedung dan kanopi lalu ditindak lanjuti oleh pemerintah. Terhadap fungsi bangunan teras dan kanopi yang melanggar aturan seperti digunakan untuk berjualan atau sebagai bangunan tambahan untuk menempatkan barang dagangannya akan diberikan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan

<sup>12</sup> Damsyar & Indrayani, *Pengantar Sosilogi Pasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 1

<sup>13</sup> Peraturan Walikota Solok Nomor 13 tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila pedagang atau pemilik toko masih melanggar maka SATPOL PP menyampaikan rekomendasi pembongkaran kepada Walikota.

Kawasan perdagangan Pasar Raya solok di jalan Datuk Perpatih Nan Sabatang Pemilik toko masih banyak yang memanfaatkan teras atau kanopi bangunannya untuk berjualan dan menempatkan barang daganganya dibawah bangunan kanopi. Hal tersebut mengakibatkan terganggu nya hak para pejalan kaki yang seharusnya bisa berjalan diarea bangunan teras dan kanopi sekarang harus berjalan di area lain contoh nya seperti ke jalan raya atau area parkir dan membuat terganggu para pengendara lalu lintas hal ini juga membuat kawasan perdagangan menjadi tidak rapi dan tertib serta mengakibatkan tidak terciptanya keamanan, keindahan tata ruang kota dan estetika. Dalam menilai sebuah ruang yang memiliki nilai estetika masyarakat dapat memandang ruang tersebut. Memandang merupakan suatu kegiatan melihat dan mengamati suatu tempat yang dianggap menarik dan memiliki nilai estetika. Pemandangan pada suatu kota memiliki keseimbangan dan infrastruktur. Dengan demikian, pemandangan didalam suatu kota memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan nilai-nilai estetika sehingga kota yang memiliki keseimbangan yang baik dalam hal ini estetika kota juga merupakan pemandangan yang baik bagi kota tersebut.<sup>14</sup>

Faktor-faktor yang membuat pemandangan terlihat baik di dalam sebuah kota adalah keseimbangan lingkungan didalam kota, keindahan bangunan dan keserasian bangunan dengan lingkungan sekitar kota, oleh karena itu faktor tersebut sangat berkaitan dengan nilai estetika sebuah kota yang tetap terjaga keberadaan lingkungan nya, baik keseimbangan lingkungan serta keindahan

<sup>14</sup> Shanzah Isminingtias, *Estetika Kota* , (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, volume, 5, 2017), h. 21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangunan dilingkungan sekitar termasuk didalamnya mengenai penggunaan teras dan kanopi dikawasan perdagangan. Namun demikian juga dengan estetika pengelolaan pasar seperti lapang nya jalan, tertib nya pedagang dan pembeli, menariknya tata ruang pasar untuk dipandang, tertibnya parkir, serta lancar nya lalu lintas.

Sesuai dengan pengamatan awal yang dilakukan peneliti Dan sejauh ini pemerintahan daerah belum melakukan kebijakan sebagaimana yang berdasarkan dalam peraturan Walikota Solok tentang penataan bangunan teras dan kanopi dikawasan Perdagangan Pasar Raya Solok bahwa tidak di perbolehkan untuk berjualan dan menempatkan barang dagangan dibawah bangunan kanopi. Namun pada suatu kasus seorang pedagang yang bernama Fauzan menempatkan barang dagangan nya dibawah bangunan kanopi, melihat Fauzan yang berjualan di teras dan dibawah bangunan kanopinya maka pedagang yang lain mengikuti hal yang dilakukan oleh Fauzan. Pada lantai 1 (satu) setiap bangunan toko atau ruko rata-rata memiliki bangunan kanopi dan setiap pedagang menggunakan teras dan kanopi nya untuk berjualan dan menempatkan barang dagangannya, namun sejauh ini pemerintah daerah belum melakukan kebijakan kebijakan sebagaimana yang berdasarkan dalam peraturan Walikota Solok tentang penataan bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan Pasar Raya Solok. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DIKAWASAN PERDAGANGAN PASAR RAYA SOLOK.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah maka penulis membatasi masalahnya yaitu : Pelaksanaan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan Pasar Raya Solok

## C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah Dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan Pasar Raya Solok?
2. Apa Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan Pasar Raya Solok.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan Pasar Raya Solok.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran pada almamater dimana penulis menuntut ilmu dalam permasalahan yang sama.

### E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati mengandalkan filsafat digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah<sup>15</sup>

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan penelitian yang mengambil lokasi di Pasar Raya Solok Jalan Datuak Parpatih Nan Sabatang, Kelurahan Ps. Pandan Air Mati, kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat.

#### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah UUPTD Pasar atau bidang Dinas Pasar Raya Solok dan Kantor satuan polisi pamong praja ( satpol PP) Kota Solok .
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan penataan bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan Pasar Raya solok.

#### 3. Populasi dan Sampel

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>16</sup> Populasi pada penelitian ini adalah 109 orang pemilik toko yang berjualan dibawah bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan Pasar Raya solok, 2 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan 1 orang kepala bidang Dinas Pasar.
- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian.<sup>17</sup> Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu sampel dari populasi berdasarkan apa adanya, dengan alasan untuk kemudahan mendapatkan data.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011), h. 23

<sup>18</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 140.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel Responden 1.1:**

Responden	Populasi	Sampel	Persen
Pemilik toko yang berjualan dibawah bangunan teras dan kanopi	109	16	15%
SATPOL PP	2	2	100%
Kepala Bidang dinas Pasar	1	1	100%
Jumlah	112	19	

#### 4. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data. Jika dilihat dari sifat penelitiannya penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>19</sup>

#### 5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklarifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam ini meliputi wawancara dan observasi tentang Pelaksanaan Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan Pasar Raya Solok.

## b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, tesis, artikel, disertasi, internet. Data sekunder yaitu data tidak langsung. Dapat diperoleh secara manual, online, atau kombinasi keduanya. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka maupun online yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan Pasar Raya Solok. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan sekunder seperti doktrin, jurnal hukum dan internet.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.<sup>20</sup>

b. Wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap mengarah pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara ini dimaksud agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.<sup>21</sup>

c. Study pustaka

Penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 72

<sup>21</sup> *Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi

Yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

7. Metode Penulisan

Untuk mengelolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan Metode Deduktif. Yaitu, suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

**F. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai kaitan erat satu sama lainnya, yaitu sebagai berikut :

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : MEMBAHAS TENTANG DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

Pada bab ini membahas gambaran umum Pasar Raya Solok, bidang Dinas Pasar, dan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) kota Solok. Keadaan geografis dan demografis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : KERANGKA TEORI**

terdiri dari Bangunan teras dan kanopi, Peraturan yang mengatur tentang penataan bangunan teras dan kanopi di Kawasan perdagangan, Kebijakan publik Otonomi daerah, Tata ruang dan estetika, Pengelolaan pasar.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

berisikan tentang pelaksanaan peraturan Walikota Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang penataan bangunan teras dan kanopi di kawasan perdagangan Pasar Raya Solok dan faktor penghambat pelaksanaan penataan bangunan teras dan kanopi di kawasan perdagangan Pasar Raya kota Solok.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kota Solok

##### 1. Sejarah Kota Solok

Kota Solok (kotamadya Solok) dahulunya merupakan salah satu wilayah Nagari dikabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Hasrat untuk menjadi kotamadya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok, melalui panitia yang diketuai oleh Marah Adin Dt. Penghulu Sati yang kemudian berkembang melalui suatu rapat umum di lapangan Kerapatan Adat Nagari Solok di Lubuk Sikarah, yang dihadiri oleh para penghulu dan pemuka masyarakat Nagari Solok yang dipimpin oleh NHT Dt. Bandaro Hitam, selanjutnya acara bulat menyetujui dan mendukung perkembangan Nagari Solok menjadi kotamadya Solok. Berhubung terjadi agresi Belanda tahun 1949, maka kerja panitia terhenti dan setelah terbentuk pemerintahan darurat pada bulan mei 1949, maka kepanitiaan dilanjutkan oleh suatu panitia kota kecil.<sup>22</sup>

Harapan pembentukan kota ini kemudian mendapatkan sambutan dari Pemerintah pusat, dan dalam rangka kemungkinan di resmikannya Nagari Solok menjadi kotamadya, maka dibentuklah panitia persiapan peresmian pada 6 Januari 1968 bertempat di Mesjid Pasar Nagari Solok, yang dinamakan panitia sepuluh yang diketuai oleh NHT Dt. Bandaro Basa, serta melalui bantuan Bupati kepala daerah kabupaten Solok saat itu, Letkol Drs.Zaghloel St. Kebesaran pada tanggal 16 desember 1970 usaha pemantapan realisasi kotamadya Solok dipenuhi

<sup>22</sup> [www.Solokkota.go.id](http://www.Solokkota.go.id)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah pusat, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh. Kota Solok akhirnya diresmikan pada tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Luar Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Dengan terbentuknya kotamadya Dati II Kota Solok maka dikeluarkanlah surat keputusan menteri Dalam Negeri Nomor pemda 7/9-10-313 tanggal 23 November 1970 mengangkat Drs. Hasan Basri sebagai pejabat kepala Daerah yang pertama.

Pelayanan Publik Pemerintah Kota Solok mulai secara resmi dibuka pada tanggal 21 Desember 1970 di kantor Balai Kota Solok dan mulai saat itu pemerintah Kotamadya Solok secara bertahap melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.<sup>23</sup>

Wilayah Kota Solok berasal dari salah satu wilayah adat yaitu nagari Solok berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1966, ditambah ditambah jorong laing dari bagian nagari guguk Sarai diwilayah kabupaten Daerah tingkat II Solok. Dalam usaha penyempurnaan dan kelancaran pelayanan publik dipemerintahan daerah tingkat II Kotamadya Solok, maka dikeluarkan surat keputusan nomor 21/Desth/Wako/71 tanggal 10 maret 1971 tentang pembentukan 13 resort Administrasi yaitu:

1. Resort Tanah Garam
2. Resort Enam Suku
3. Resort Sinapa Piliang

<sup>23</sup> *Ibid*





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Resort IX Korong
5. Resort Kampai Tabu Karambie (KTK)
6. Resort Aro IV Korong
7. Resort Simpang Rumbio
8. Resort Koto Panjang
9. Resort Pasar Pandan Air Mati
10. Resort Laing
11. Resort Tanjung Paku
12. Resort Nan Balimo
13. Resort Kampung Jawa

Berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 13 tahun 1982 tentang pembentukan kecamatan Padang Panjang timur, kecamatan Padang Panjang Barat dikotamadya daerah tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawah Lunto Utara, kecamatan Sawah Lunto selatan dikota madya daerah tingkat II Sawah Lunto, kecamatan Lubuk Sikarah, kecamatan Tanjung Harapan dikotamadya daerah tingkat II Solok, kecamatan Payakumbuh Utara, kecamatan Payakumbuh Barat dan kecamatan Payakumbuh timur dikotamadya daerah tingkat II Payakumbuh dalam wilaya provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat, maka seluruh resort administrasi tersebut menjadi kelurahan.<sup>24</sup>

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pengguna Istilah “Kotamadya” dirubah dengan istilah

<sup>24</sup> *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kota” sehingga secara resmi kemudian sebutan “kotamadya Solok” menjadi “kota Solok”.

## 2. Visi Kota Solok

visi kota Solok adalah terwujudnya masyarakat kota yang beriman, bertaqwa, dan sejahtera menuju kota perdagangan, jasa, serta pendidikan yang maju dan modern.

## 3. Misi Kota Solok

Misi kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK “Syara’ Mangato Adat Mamakai”.
2. Mewujudkan kehidupan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi.
3. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia dan generasi muda yang beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing.
4. Menjadikan kota solok sebagai pusat perdagangan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis unggulan daerah melalui perdagangan, pariwisata, dan jasa lainnya serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.<sup>25</sup>
5. Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya.

<sup>25</sup> Ibid



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana yang berwawasan lingkungan.

#### 4. Letak Geografis

Kota Solok terletak pada posisi  $0^{\circ}32''$  LU –  $1^{\circ}45''$  LS,  $100^{\circ}27''$  BT –  $101^{\circ}41''$  BT -  $101^{\circ}41''$  BT dengan luas  $57,64 \text{ km}^2$  (0,14% dari luas provinsi Sumatera Barat). Wilayah administrasi kota Solok berbatasan dengan kabupaten Solok dan kota padang. Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menjunjung perekonomian masyarakat kota Solok dan kabupaten Solok pada umumnya.

Topografi kota Solok bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian 390 dpl serta curah hujan rata-rata 184,31 mm kubik per tahun. Terdapat tiga anak sungai yang melintasi kota Solok, yaitu sungai Batang Lembang, sungai Batang Gawan, sungai Batang Air Binguang. Suhu udara berkisar dari  $26,1^{\circ}\text{C}$  sampai  $28,9^{\circ}\text{C}$ . Dilihat dari jenis tanah, 21,76% tanah di kota solok merupakan tanah sawah dan sisanya 78,24% berupa tanah kering.<sup>26</sup>

#### 5. Batas wilayah

1. Utara: kecamatan nagari tanjuang bingkuang, aripan dan kuncir kabupaten solok.
2. Selatan: kecamatan nagari gaung, panyakalan, koto baru, selayo kabupaten solok, nagari muaro panah dan kota padang.
3. Barat: kecamatan nagari selayo, koto sani kabupaten solok.

<sup>26</sup> Ibid



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Kecamatan Tanjung Harapan

Tanjung harapan adalah sebuah kecamatan dikota solok, sumatera bara, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerinrah Republik Indonesia nomor 13 tahun 1982. Dikecamatan tanjung harapan terdapat 6 (enam) kelurahan yaitu: kampung jawa, koto panjang, laing, nan balimo, pasar pandan air mati, tanjung paku.

## 7. Demografi

Hasil demografi penduduk kota Solok tercatat sebanyak 59.172 jiwa, terdiri atas 28.989 laki-laki dan 30.173 perempuan, dengan sex ratio sebesar 0,96. Ini berarti setiap 1000 perempuan berabanding 960 laki-laki.

Dengan luas wilayah 5.764 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk kota Solok adalah sebanyak 1.026 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Tanjung Harapan adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 1.223 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>27</sup>

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Penduduk Kota Solok.**

Kecamatan	Luas	Jumlah penduduk	Kepadatan
Lubuk Sikarah	35.00	31.466	899
Tanjung Harapan	44.64	27.696	1.223
Kota Solok	57.64	59.162	1.026
Jumlah	137.28	118.324	901.249

Sumber Data: Web Resmi Pemerintahan Kota Solok 2018

Dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di kota Solok dapat dilihat bahwa penduduk perempuan lebih dominan pada usia produktif dibandingkan dengan laki-laki. Keadaan itu tentunya akan membentuk pola

<sup>27</sup> Ibid





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang banyak memberikan peran lebih kepada kaum perempuan. Kenyataan itu merupakan konsekuensi logis akibat besarnya kecenderungan penduduk laki-laki dan dewasa untuk merantau dalam mencari pekerjaan yang lebih baik di daerah lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>28</sup>

**Tabel 2.2**  
**Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kota Solok**

Kelompok (tahun)	Umur laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Total (jiwa)	Sex ratio
0-4	3.537	3.404	6.941	104
5-9	3.306	3.335	6.641	99
10-14	3.369	3.319	6.688	102
15-19	3.577	3.972	7.549	90
20-24	2.431	2.541	4.972	96
25-29	2.284	2.542	4.826	90
30-34	2.040	2.162	4.202	94
35-39	2.141	2.258	4.399	95
40-44	1.878	1.855	3.733	101
45-49	1.535	1.331	2.866	114
50-54	813	832	1.645	97
55-59	650	690	1.340	95
60-64	550	634	1.184	87
65-69	356	474	830	75
70-74	278	363	641	77
75+	243	426	705	53

<sup>28</sup> Ibid

Total	28.988	30.174	59.162	96,00
-------	--------	--------	--------	-------

Sumber data: website Resmi Pemerintahan Kota Solok 2018

## 8. Perekonomian

Data produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan ekonomi suatu daerah karena manfaat yang dapat diambil dari data tersebut diantaranya untuk melihat nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, laju pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, pendapatan perkapita pada satu tahun, atau periode pada suatu daerah tertentu.

Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian atas dasar harga konstan dimaksudkan agar dapat menggambarkan perkembangan riil karena pengaruh harga sudah dihilangkan. Sedangkan atas dasar harga berlaku dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun atau waktu yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Pertumbuhan ekonomi secara makro diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat melalui angka PDRB atas dasar harga konstan, untuk menghilangkan pengaruh fluktuasi harga dalam perhitungan.

Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi kota solok terlihat lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun sebelum nya yang mengalami penurunan 1,36%. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan perekonomian dunia yang sedang mengalami penurunan. Sementara itu PBRD, menurut harga berlaku

<sup>29</sup> Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga juga terjadi penurunan sebesar 6,79%. PDRB menurut harga berlaku sangat di pengaruhi oleh inflasi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan (sebesar 5,23%

## 9. Keuangan daerah

Keuangan daerah tidak saja berperan sebagai salah satu faktor pendukung terselenggaranya pembangunan daerah yang baik namun juga merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengurus daerahnya. Kota solok memiliki sumber keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain.<sup>30</sup>

## 10. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Struktur PAD dibentuk oleh pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan PAD, maka pemerintah daerah terus berupaya mencari potensi yang bisa digali dan dimanfaatkan sebagai sumber PAD dan mengoptimalkan sumber PAD yang telah ada.

## 11. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari: bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana primbangan dari provinsi.<sup>31</sup>

## B. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) didirikan pertama kali di Yogyakarta berdasarkan Peraturan Nomor 1 tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Datasemen Polisi Pamong Penjaga Keamanan Kepanohan, yang bertugas menjaga stabilitas teritorial daerah-daerah yang baru di amankan angkatan perang.<sup>32</sup> Saat itu, tugas SATPOL PP berada diluar bidang kepolisian negara yaitu menangani bidang pemerintahan umum khususnya bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah. Seiring berjalan nya waktu keberadaan SATPOL PP dipertegas dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan yang mengamanatkan dibentuknya SATPOL PP untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketertiban masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi pada tahun 2017 terjadi penggabungan instansi SATPOL PP dengan pemadam kebakaran yang dinamai “satuan polisi oamong praja dan pemadam kebakaran” sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kota solok nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah. Penggabungan instansi ini di dasari adanya keterkaitan tugas perlindungan masyarakat. Dengan penggabungan ini SATPOL PP yang awalnya merupakan instansi dengan eselonering III/a, berubah menjadi eselonering II/a. kantor Satuan polisi pamong praja terletak di Jl.Syech kukut No.2 kelurahan tanjung paku, kecamatan tanjung harapan, provinsi Sumatera Barat.

Visi dan misi satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kota solok merupaka gambaran,cita-cita, kondisi ideal yang diharapkan serta menjadi

<sup>32</sup> Polppdamkar.Solokkota.go.id





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cermin komitmen yang akan datang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Visi yang dibuat oleh satuan polisi pamong praja adalah sebagai berikut:

satuan polisi pamong praja dan Damkar yang profesional dalam menjaga ketertiban, keamanan dikota Solok. Sebagai satuan yang memiliki tugas berhubungan langsung dengan penegakkan peraturan kualifikasi anggota yang profesional memegang peran kunci dalam menjalankan tugas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran . pengembangan keanggotaan yang mengarah profesional akan mampu mendukung ketertiban, keamanan dan ketentraman kota solok. Devariasi dari visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah misi sebagai berikut:

1. Meciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib.
2. Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.<sup>33</sup>

**Tabel 2.3**  
**Standar Operasional Prosedur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran**

NO.	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL
1.	Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan berita acara penyerahan barang bukti</li> <li>- Penunjukan petugas PAM pilkada</li> </ul>
2.	Seksi operasional dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penunjukan petugas patroli wilayah</li> <li>- Pelaksanaan operasi penyitaan</li> <li>- Penertiban perda dan perwako</li> <li>- Pelaksanaan operasi gabungan</li> <li>- Pembuatan laporan kronologi operasi</li> </ul>

<sup>33</sup> Ibid

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		gabungan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penunjukan personil provos</li> <li>- Pembayaran uang makan personil intel</li> <li>- Penerbitan SK danru</li> <li>- Penerbitan SK danton</li> <li>- Pelaksanaan tugas penyidikan</li> <li>- Pembuatan laporan pelaksanaan operasi penyitaan</li> <li>- Pembuatan laporan pelaksanaan operasi gabungan</li> <li>- Pembuatan laporan kronologi penyitaan</li> <li>- Perencanaan penindakan</li> </ul>
3.	Seksi penegakkan peraturan perundangan-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan tindak lanjut surat pernyataan</li> <li>- Pembuatan undangan rapat tim koordinasi TNI/POLRI</li> <li>- Pembuatan usulan surat perintah pembongkaran bangunan liar tanpa izin</li> <li>- Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan</li> <li>- Penerbitan surat tugas penyitaan</li> <li>- Penerbitan surat teguran</li> <li>- Penerbitan surat pernyataan</li> <li>- Penerbitan surat peringatan</li> <li>- Penerbitan surat panggilan pemeriksaan</li> <li>- Penerbitan SK wako untuk tim penegakkan perda</li> </ul>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan operasi penyitaan</li> <li>- Pendataan terperiksa</li> <li>- Pendataan saksi</li> <li>- Pembayaran honorarium penyidik perkara non yustisi</li> <li>- Pembayaran honorarium tim koordinasi TNI/POLRI</li> <li>- Pelaksanaan rapat tim koordinasi TNI/POLRI</li> <li>- Pembuatan laporan mulai penyidikan</li> <li>- Pemeriksaan</li> <li>- Pembuatan BAP</li> <li>- Pembayaran makan minum peserta rapat koordinasi TNI/POLRI</li> <li>- Pembayaran honorarium tim penegakkan perda</li> <li>- Penutupan tempat usaha tanpa izin</li> <li>- Penerbitan SK pembentukan tim koordinasi TNI/POLRI</li> </ul>
4.	Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengiriman nama personil peserta diklat PNS</li> <li>- Pelaksanaan pembinaan fisik</li> <li>- Pembayaran honorarium pelatih pembinaan fisik</li> <li>- Perencanaan penindakan</li> <li>- Pengawasan personil tugas</li> <li>- Penerbitan SK pelatih pembinaan fisik</li> <li>- Permintaan pelatih BMSIK</li> <li>- Pembayaran makan minum peserta pembinaan fisik</li> <li>- Pembuatan laporan pelaksanaan</li> </ul>

penindakan

- Penugasan peserta DIKSAR
- Pengiriman nama personil peserta DIKSAR
- Penugasan peserta diklat PPNS

Sumber Data: Kantor Satpol PP Kota Solok 2018.<sup>34</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>34</sup> *Ibid*



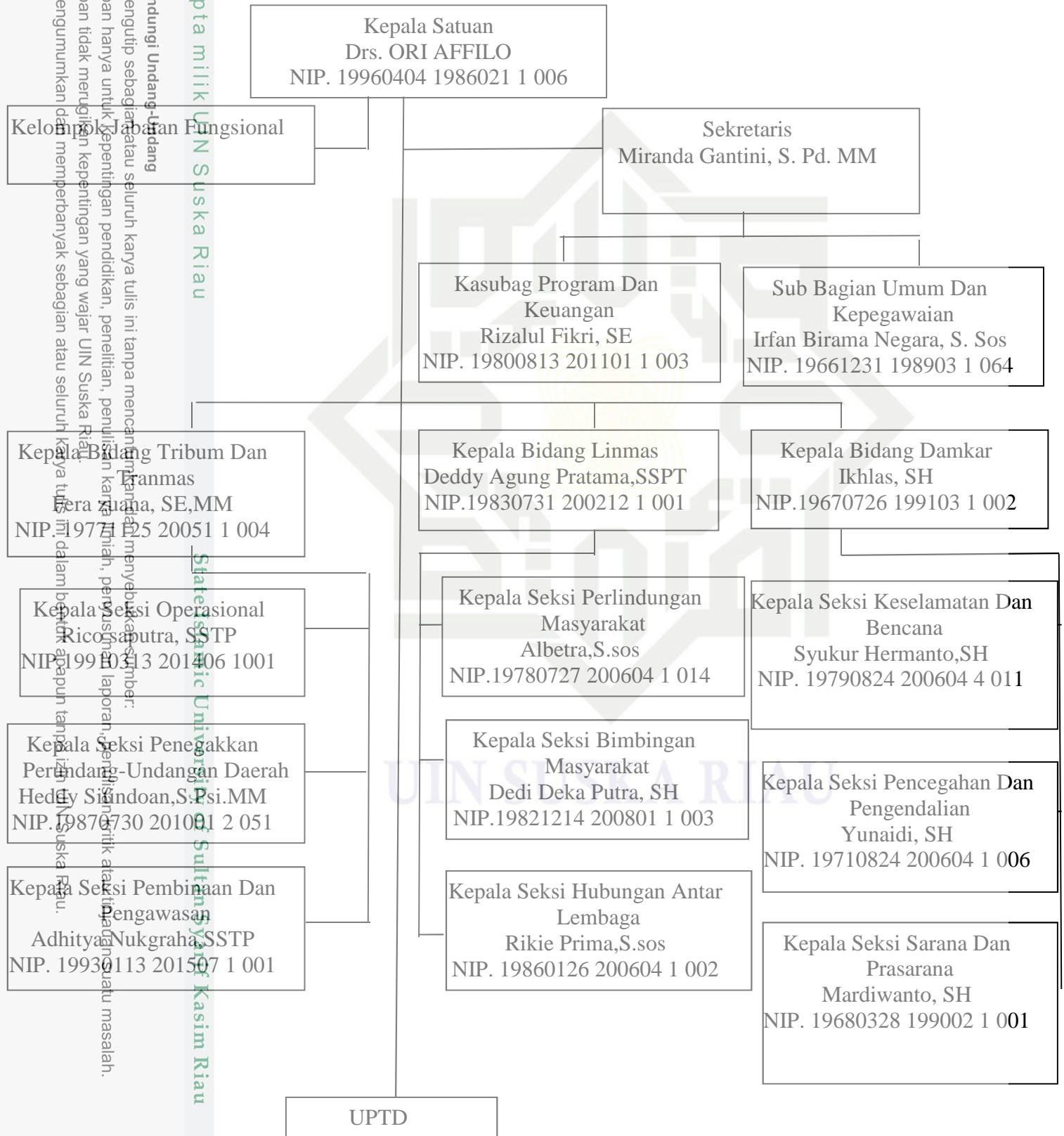


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini, dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran**



### C. Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Solok

Dalam sejarahnya dinas perdagangan dan koperasi kota Solok telah mengalami beberapa kali perubahan SOTK. Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan (KOPERINDAG) kota Solok awalnya berada dalam satu atap yang sama yaitu dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi (DISKOPERINDAG). Kemudian dipecah menjadi dua dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag). Pada bulan oktober 2013 dinas koperasi perdagangan dan perindustrian kota Solok mengalami perubahan SOTK Dengan bertambahnya Unit pelaksana (UPT) pasar maka DISPERINDAG kembali dengan dinas perdagangan dan koperasi UMKM.<sup>35</sup>

Terletak di jalan samsu tulus, kelurahan nan balimo, kecamatan Tanjung Harapan, kota Solok, provinsi Sumatera Barat.

Visi dinas perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah kota Solok yaitu: Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok tahun 2016 – 2021, Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus selaras dengan Visi Kota Solok 2016 – 2021, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan Yang Maju dan Modern”.

<sup>35</sup> Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Solok tahun 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok menetapkan visi 2016 - 2021, yakni :

“Terwujudnya Kota Solok Sebagai Kota Perdagangan Yang Maju dan Modern Yang Berorientasi Pasar dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan”.

Misi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yaitu:

1. Kebijakan penguatan kelembagaan dan usaha koperasi bertujuan untuk memajukan lembaga dan usaha koperasi agar menjadi lebih berkualitas. Banyaknya koperasi yang bermasalah salah satu di sebabkan karena koperasi tersebut lemah dalam pengelolaan kelembagaannya. Karena itu perlu upaya untuk terus melakukan pembinaan yang intensif guna menguatkan kelembagaankoperasi. Di samping itu pembinaan usaha koperasi yang dilakukan oleh pendamping terhadap pelaku koperasi di harapkan dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala lebih besar.
2. UMKM mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM membantu Pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dengan menyerap banyak tenaga kerja baru. Di perkirakan jumlah UMKM akan meningkat setiap tahunnya, oleh sebab itu perlu di lakukan pembinaan dan fasilitasi dalam pengelolaan UMKM agar produk UMKM berkualitas dan berdaya saing. Keberadaan inkubasi bisnis merupakan salah satu cara dalam pengembangan UMKM karena dapat menciptakan pembentukan usaha baru.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Ibid



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mewujudkan Kota Perdagangan, sarana dan prasarana perdagangan harus di sediakan dan di tata dengan baik. Sarana dan prasarana perdagangan berfungsi untuk melayani dan menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang di lengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang di butuhkan. Di samping itu adanya jaminan perlindungan terhadap konsumen di perlukan agar pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

4. Kerjasama perdagangan bertujuan menciptakan kondisi yang saling menguntungkan untuk kemajuan perdagangan. Kerjasama perdagangan merupakan cara untuk memperkenalkan produk. Melalui promosi dan mengikuti event-event daerah dan luar daerah akan meningkatkan jaringan kerjasama pemasaran produk-produk.

Kewenangan dan data umum organisasi koperindag dan UMKM adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan tugas Walikota di Bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.<sup>37</sup>

Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

<sup>37</sup> Ibid



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>38</sup>

## 2. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumah tanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang / asset, administrasi kepegawaian, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

<sup>38</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta akuntansi dan administrasi keuangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi persuratan.
- b. Pengkoordinasian dan pengelolaan kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan.
- c. Pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi barang / asset.
- d. Pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e. Pengkoordinasian dan pengelolaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pengkoordinasian dan pengelolaan akuntansi dan administrasi keuangan.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.<sup>39</sup>

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, kearsipan dan kepustakaan, kerumah tanggaan serta kehumasan dan keprotokoleran.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan adminstrasi barang / asset.
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

<sup>39</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

2. Sub bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan adminstrasi keuangan. Kepala sub bagian program dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggrarakan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan perencanaan dari masing-masing bidang, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan penyusunan laporan.
- b. Penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

3. Bidang Koperasi, Industridan UMKM

Bidang Koperasi, Industri dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaantugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.Kepala Bidang Koperasi, Industri dan UMKM mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi, Industri dan UMKM.<sup>40</sup>

Kepala Bidang Koperasi, Industri dan UMKM dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

---

<sup>40</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Koperasi, Industri dan UMKM.
- b. Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi, Industri dan UMKM.
- c. Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi, Industri dan UMKM.
- d. Pengoordinasian pemberdayaan Koperasi, Industri dan UMKM
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.
- f. koperasi, industri dan umkm.
- g. Pelaksanaan pembinaan dan Bidang Koperasi, Industri dan UMKM terdiri dari :

1) Seksi Bina Kelembagaan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi , industri dan umkm. Kepala Seksi Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan pengembangan organisasi, sumber daya dan manajemen koperasi serta kelembagaan koperasi, industri dan umkm.
- b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Ibid



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Seksi Bina Usaha dan Bina Permodalan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha dan permodalan koperasi, industri dan umkm.

Kepala seksi bina usaha dan bina permodalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha dan permodalan koperasi, industri dan umkm.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha sesuai tugas dan fungsi.

3) Seksi Industri dan ESDM

Tugas melaksanakan dan menyiapkan pengembangan industri, energi dan sumber daya mineral. Kepala seksi industri dan esdm menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengembangan indsutri, energi dan sumber daya mineral.
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian industri, energi dan sumber daya mineral.
- c. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pengendalian perizinan industry, energi dan sumber daya mineral.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan dan jasa.

Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan.
- b. Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, dan pendaftaran perusahaan.
- c. Melaksanakan penerbitan izin usaha dan pendaftaran perusahaan bagi usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan dan bentuk-bentuk usaha lainnya.
- d. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- e. Partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pembinaan terhadap pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
- g. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

5. Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar

Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang sarana dan pengelolaan pasar.

Kepala Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan pengelolaan pasar.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan pengelolaan pasar.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana pengelolaan pasar.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan pengelolaan pasar.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.<sup>44</sup>

Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- 1) Seksi Sarana Perdagangan, Pendataan dan Penempatan

---

<sup>44</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mempunyai tugas melaksanakan teknis pendataan, pengaturan dan penempatan pedagang. Kepala seksi sarana perdagangan, pendataan dan penempatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan pedagang dan fasilitas pasar.
- b. Pelaksanaan pengaturan, penempatan pedagang dan fasilitas pasar lainnya.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

2) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan penagihan yang menjadi sumber penerimaan daerah. Kepala seksi penagihan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penagihan yang menjadi sumber penerimaan daerah.
- b. Pelaksanaan pengawasan penagihan yang menjadi sumber penerimaan daerah
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.<sup>45</sup>

3) Seksi Ketertiban dan Kebersihan

Mempunyai tugas melaksanakan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar. Kepala seksi ketertiban dan kebersihan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengawasan ketertiban di lingkungan pasar.
- b. Pelaksanaan dan pengawasan kebersihan lingkungan pasar.

<sup>45</sup> Ibid



- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.<sup>46</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>46</sup> *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pelaksanaan Kebijakan Publik

Pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika dilaksanakan ternyata pencapaiannya tidak sesuai dengan rencana semula. Fakta yang ada menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum didalam dokumen kebijakan ternyata ketika harus berhadapan dengan berbagai realitas dilapangan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang di buat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dan terbentuk program pelaksanaannya.<sup>47</sup>

Menurut Candler dan Platop dalam Hesel Nogi S. Tangkilisan, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk mencegah masalah publik atau pemerintah. Pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.<sup>48</sup>

Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unuk, karena berkaitan dengan institusi pemerintah, yang oleh Easton yang dicirikan

<sup>47</sup> Abu Samah, *Hukum Kebijakan Publik*, (Pekanbaru, 2018), h. 1

<sup>48</sup> *Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai “kekuasaan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. *Pertama*, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari pemerintah senyatanya, dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, kebijakan pemerintah dapat merupakan kebijakan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu masalah.<sup>49</sup>

Kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk ketetapan hukum adalah untuk menjamin legalitasnya di lapangan. Namun kalau merujuk pada pendapat Laswell bahwa kebijakan publik adalah “apa saja yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah”. Maka sesungguhnya tidak semua kebijakan publik itu harus dilegalkan dalam bentuk ketetapan hukum. Hanya saja yang menjadi persoalan di sini adalah berapa banyak kebijakan publik yang memerlukan kepastian hukum dan berapa banyak yang tidak. Jawabannya tentulah lebih banyak kebijakan publik yang memerlukan kepastian hukum di dalamnya.

Kita mengambil contoh misalnya pemerintah merasa perlu untuk membuat kebijakan publik yang mengatur tentang penatan kota. Maka pada saat itu pemerintah harus melakukan banyak hal dalam proses kebijakan publik tersebut, mulai dari perhitungan-perhitungan yang bersifat ekonomis sampai

<sup>49</sup> Muchlis Hamid, *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2015), Cet.Kedua, h.37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada perhitungan yang bersifat politis. Namun, untuk keperluan tersebut tentu pemerintah harus menetapkan secara hukum, dalam bentuk Perda misalnya.<sup>50</sup>

## B. Bangunan Teras Dan Kanopi

Bangunan adalah bangunan yang berupa gedung dan bangunan yang bukan gedung. Bangunan gedung yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah atau di dalam air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal maupun, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan-kegiatan khusus. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan bangunan yang meliputi proses perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan.<sup>51</sup>

Peraturan Walikota Solok Nomor 13 tahun 2017 Pasal 1 ayat (6) tentang Penataan Bangunan teras dan Kanopi adalah bagian pelengkap bangunan yang bukan merupakan bagian konstruksi bangunan utama yang terdapat di bagian depan dan samping bangunan yang terbuat dari bahan kayu, besi, yang sejenis nya memiliki penutup bagian atas (atap). Teras adalah bidang datar, ruang peralihan dari area luar menuju ruang dalam bangunan atau sebaliknya, ruang teras ini dinaungi atap dan yang memiliki satu atau dua

<sup>50</sup> Muchin & Fadillah Putra, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Surabaya, Averoes Press, 2015), Cet. Kedua, h. 37

<sup>51</sup> Heinz frick & purwanto *Dasar-dasar Kontruksi Dalam Arsitektur*, (Yogyakarta, Kanisius media, 2007) h. 18



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinding.<sup>52</sup> Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Dikawasan Perdagangan pasal 1 ayat (5) penataan teras dan kanopi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam rangka menata teras bangunan dan kanopi bertiang pada pertokoan atau kawasan lainnya dikawasan perdagangan yang meliputi penyesuaian tampilan konstruksi bangunan teras dan kanopi bertiang, penindakan pemotongan dan pembongkaran bangunan teras dan kanopi kanopi bertiang.<sup>53</sup>

**C. Pengertian Penataan**

Penataan bangunan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan atau kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.<sup>54</sup>

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.<sup>55</sup>

**D. Peraturan yang Mengatur tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi****1. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan.**

<sup>52</sup> Kbbi.Web.id

<sup>53</sup> Peraturan Walikota Solok Nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan

<sup>55</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2 Peraturan Walikota Solok 13 tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan Penggunaan Kanopi adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan gedung untuk perdagangan berupa pertokoan (rumah toko, toko dan sejenisnya) yang bangunan kanopi tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha.
- b. Kanopi yang dibuat atau melekat pada bangunan gedung untuk perdagangan berupa rumah atau toko dan sejenisnya tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha.
- c. Penggunaan kanopi dan sejenisnya tidak dapat digunakan untuk penyimpanan barang dan pemajangan barang dagangan.
- d. Kawasan perdagangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara umum adalah bangunan gedung meliputi: perdagangan, perindustrian, terminal, gudang, pelayanan umum, rumah tinggal, bangunan gedung perkantoran, dan pendidikan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Solok nomor 13 tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Dikawasan Perdagangan dijelaskan pula lokasi bangunan perdagangan dengan menggunakan teras dan atau kanopi sebagai berikut:

- (1) lokasi pertokoan pada ruas jalan tertentu dan kawasan perdagangan pada ruas jalan ir.soekarno, jl.dr.moh.hatta, jl.jendral sudirman, angkutan kota solok, jl.jamil jambek dt.parpatih nan sabatang, jl.natsir pamuncak, jl.proklamasi jl.diponegoro, jl.bandar pandung, dan sepanjang jalan lingkaran utara.
- (2) lokasi pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk yang menggunakan teras dan kanopi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1-5 Peraturan Walikota Solok Nomor 13 tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan pada bagian pengawasan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung dengan kanopi yang memiliki indikasi sebagai berikut:
  - a. Fungsi perubuhan
  - b. Membahayakan lingkungan
  - c. Melebihi ukuran yang telah ditetapkan
  - d. Kanopi yang tidak layak fungsi
- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengamatan petugas, tim dan atau laporan dari masyarakat.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah daerah
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dalam 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maka masyarakat dapat menuntut pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1-3 Peraturan Walikota Solok Nomor 13 tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan Pelaksanaan Pembongkaran sebagai berikut:

- (1) Pembongkaran bangunan teras dan kanopi dapat dilakukan sendiri oleh pemilik dan atau pengguna bangunan gedung.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pembongkaran bangunan teras dan kanopi mengakibatkan gangguan kecelakaan dan kerugian harta benda orang lain maka menjadi tanggung jawab pengguna atau pemilik bangunan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Apabila pemilik atau pengguna bangunan teras dan kanopi tidak melaksanakan pembongkaran sendiri dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat penetapan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukn oleh pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

## **2. Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017**

Dalam Pasal 3 ayat 1-4 Peraturan Walikota Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan pemasangan kanopi pada bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagian depan dan samping bangunan yang bersisian dengan jalan dapat dibenarkan sepanjang 2 meter dari gaeris sepadan bangunan dengan konstruksi tanpa tiang.
- b. Dihapus
- c. Panjang kanopi sebagaimana di maksud huruf a dihitung dari jarak lantai 2 bangunan dengan bentuk seragam dengan blok bangunan disekitarnya.
- d. Banguan kanopi tidak dibenarkan untuk dimanfaatkan sebagai bangunan tambahan, tempat berjualan atau menempatkan barang dagangan.

## **F. Otonomi Daerah**

Istilah otnomi (*autonomy*) secara etimologi berasal dari kata yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian dapat dipahammi bahwa otonomi daerah adalah hak





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturang perundang-undangan. Pemerintahan adalah kewenangan sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau/area, jadi pemerintahan daerah bentuk otonomi daerah adalah wewenang pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya dan idiologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungan.<sup>56</sup>

Istilah pemerintahan menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin, menjelaskan bahwa suatu system dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu negara.<sup>57</sup>

Menurut Bagir Manan dengan mengacu kepada beberapa pendapat para sarjana, menjelaskan bahwa secara yuridis, ada perbedaan yang sangat nyata antara “Negara” dan “Pemerintah”. Negara adalah sebuah badan (*body*), sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan negara (*organ*). Pemerintah

<sup>56</sup> Abu Samah & Ali Bi Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru, 2016), h. 1

<sup>57</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung, Alfabeta cv, 2014), h. 17



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan Negara yaitu, Lembaga Tertinggi (MPR), Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung dan BPK), sedangkan Pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden beserta jajaran pada lingkup Eksekutif dan tidak termasuk kekuasaan Legislatif dan Yudikatif sesuai dengan UUD 1945, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesarakat kejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.<sup>58</sup>

Secara konseptual perlu dipahami tentang posisi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

*“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.”*

Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

<sup>58</sup> Ibid



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan undang-undang nomor 23 tahun 2014.

**F. Tata Ruang dan Estetika**

Undang -undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 3 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkurang alam dan lingkungan buatan.
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.<sup>59</sup>

Dalam Undang-hndang Penataan Ruang Pasal 1 butir 5 dikemukakan: “penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.” Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW nasional, provinsi, mapun kabupaten/kota harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian diharapkan Penataan Ruang dapat berperan untuk:

<sup>59</sup> Robert J Kodoatie & Roestam Sajarif, *Tata Ruang Air*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- b. mencengah atau menghindari pemborosan pemanfaatan ruang.
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas ruang.

Berkaitan dengan tata ruang, maka satu hal yang perlu dipahami adalah tata ruang pada dasarnya tidak mengatur tentang kepemilikan ruang (lebih mudah dikatakan atau dikenal dengan ungkapan sehari-hari sebagai lahan), akan tetapi tata ruang lebih mengatur pada penggunaan ruang tersebut, baik pada permukaan, di bawah, maupun di atasnya.<sup>60</sup>

Estetika (keindahan) adalah suatu proses memaknai objek yang ada disekitar tempat manusia hidup. Estetika lingkungan adalah hasil dari persepsi dan sikap manusia terhadap lingkungan nya. Masalah estetika lingkungan juga di pengaruhi oleh kesukaan terhadap lingkungannya. dewasa ini orang menginginkan dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain yang meskipun tidak terlalu membahayakan tetapi merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup mereka atau tempat tinggal mereka.<sup>61</sup> Estetika lingkungan inipun adalah bagian atau komponen yang penting dan merupakan aspek yang menentukan kualitas tata ruang. Estetika lingkungan itu terwujud dalam bentuk:

<sup>60</sup> Arszandi Pratama, dkk, *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang*, (Yogyakarta:CV. Andi Offset, 2015), h. 4.

<sup>61</sup> Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan* (JakartaPT: Raja Grafindo Persada 2016), h. 37





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Terjaganya arsitektural bangunan serta kesesuaian dengan lingkungan sekitar atau bentang alam serta ketinggian bangunan.
- (b) Terbinanya lingkungan sesuai ekosistem wilayah
- (c) Lingkungan pemukiman yang bebas dari gangguan bau
- (d) Lingkungan pemukiman yang bebas dari gangguan kebisingan
- (e) Lingkungan yang bebas dari gangguan getaran
- (f) Lingkungan yang bebas dari gangguan radiasi.<sup>62</sup>

**G. Pengelolaan Pasar**

Peraturan walikota solok nomor 13 tahun 2017 pasal 1 ayat (8) Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. dengan penjual yang lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan Masing-masing Daerah berlomba untuk menjadikan kawasan pasar sebagai sumber pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>63</sup>

Peraturan walikota solok nomor 13 tahun 2017 pasal 1 ayat 7 kawasa/zona perdagangan adalah batasan-batasan ruang tertentu sesuai dengan pemanfaatan ruang yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan perdagangan.

Pengelolaan:

- (a) Bupati atau walikota melalui SKPD melakukan perencanaan pasar
- (b) Perencanaan pasar meliputi fisik dan non fisik

<sup>62</sup> Veronica Kumurur, *Pembentukan Pengelolaan pasar kabupaten jepara*, (Jurnal Ilmu sosial dan politik, volume. 10, 2014) h. 16

<sup>63</sup> Silitonga Ernauli, *Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Kota Medan*, (jurnal sosial dan ilmu politik, volume 7 tahun 2018) h. 2



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan fisik meliputi: penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan, dan tata letak pasar, dan sarana pendukung

Penentuan lokasi:

- (a) Mengacu pada RT/RW kabupaten atau kota
- (b) Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
- (c) Memiliki saran transportasi yang menghubungkan kabupaten dengan kota.

Fasilitas bangunan:

- (a) Bangunan dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu
- (b) Blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah
- (c) Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup
- (d) Penataan bangunan toko
- (e) Bentuk bangunan pasar selaras dengan kebudayaan daerah.

Sarana pendukung antara lain:

- (a) Kantor pengelola
- (b) Area parkir
- (c) Lapangan jalan
- (d) Air bersih
- (e) Drainase
- (f) Tempat ibadah
- (g) Toilet umum
- (h) Sarana komunikasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(i) Tempat pengelolaan limbah<sup>64</sup>

Kelembagaan:

(a) Bupati atau walikota menetaokan struktur organisasi pengelola pasar dengan keputusan bupati atau walikota

(b) Bupati atau walikota menetapkan pejabat pengelolaan pasar

Pelaksanaan:

- a. Bupati/walikota melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.
- b. Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga, untuk pembangunan pasar, rehabilitasi pasar, penataan pasar, dan pengelolaan pasar.
- c. Kerjasama dilakukan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4. Pelaksanaan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi dikawasan Perdagangan Pasar Raya Solok belum berjalan dengan optimal karena para Pedagang yang memiliki Bangunan Teras dan Kanopi masih melanggar Peraturan Walikota tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan Pasar Raya Solok.
5. Belum optimalnya Pelaksanaan penataan Kanopi dan Teras dikawasan Pasar Raya Solok disebabkan oleh beberapa faktor, Kurangnya kepatuhan pedagang yang berjualan di Pasar Raya Solok terhadap Peraturan Walikota Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi dikawasan Perdagangan, kurangnya sosialisasi peraturan ini kepada pedagang aatau pemilik bangunan, faktor ekonomi, relasi pedagang dengan pejabat Pemerintah dalam melaksanakan peraturan Walikota yang menyebabkan penertiban terhadap bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan Pasar Raya Solok tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi dikawasan Perdagangan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

1. Untuk melaksanakan Peraturan Walikota Solok nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Dikawasan Perdagangan dengan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercipta kenyamanan, ketertiban para pedagang.
2. Para pedagang yang memiliki toko dilengkapi Bangunan Teras dan Kanopi hendaknya berpartisipasi dan mematuhi aturan demi terlaksananya Peraturan Walikota Solok tentang Pelaksanaan Bangunan Teras dan Kanopi dikawasan Perdagangan yang nyaman tertib dan kondusif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Damsyar dan indrayani, *Pengantar Sosilogi Pasar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011
- Fachruddin, *Membangun Otonomi Daerah NKRI*, Jakarta: Serat Alam Media, 2016.
- Farida Maria, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, Cet. Ke-7
- Frick Heinz dan Purwanto, *Dasar-dasar Konstruksi Dalam Arsitektur*, Yogyakarta: Kanisius Media, 2007
- Hamid Muclis, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis Dan Partisipasi*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 2015, Cet. Kedua
- Kodoatie J Robert dan Roestam Sajarif, *Tata Ruang Air*, Yogyakarta: CV Andi, 2010
- Kansil C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Makarao Muhammad Taufik , *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
- Putra Fadillah dan Muchsin, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Surabaya: Averoes Press, 2015
- Pratama Arszandi dkk, *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang*, Yogyakarta: CV Andi offset, 2015
- Samah Abu, *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa di Indonesia*, Pekanbaru, 2016
- Samah Abu, *Hukum Kebijakan Publik*, Pekanbaru, 2018



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta, 2014

Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012

Tarigan Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Tahir Arifin, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: CV Alfabeta, 2014

Wahid Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014

**JURNAL**

Ernauli Silitonga, *Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Kota Medan*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 7, 2018

Isminingtias Shanzah, *Estetika Kota* (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume, 5, 2017

Kumurur veronica, *Pembentukan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara*, (Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Volume 10, 2014

Suharjono Muhammad, *Pembentukan Peraturan Daerah* (Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 10, 2014

**WEBSITE**

[www.Solokkota.go.id](http://www.Solokkota.go.id)

[Polppdamkar.Solokkota.go.id](http://Polppdamkar.Solokkota.go.id)

[Kbbi.Web.id](http://Kbbi.Web.id)

**UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Walikota Solok Nomor 13 tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan

Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Dikawasan Perdagangan

Peraturan Walikota Solok Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamomg Praja Dan Pemadam Kebakaran



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

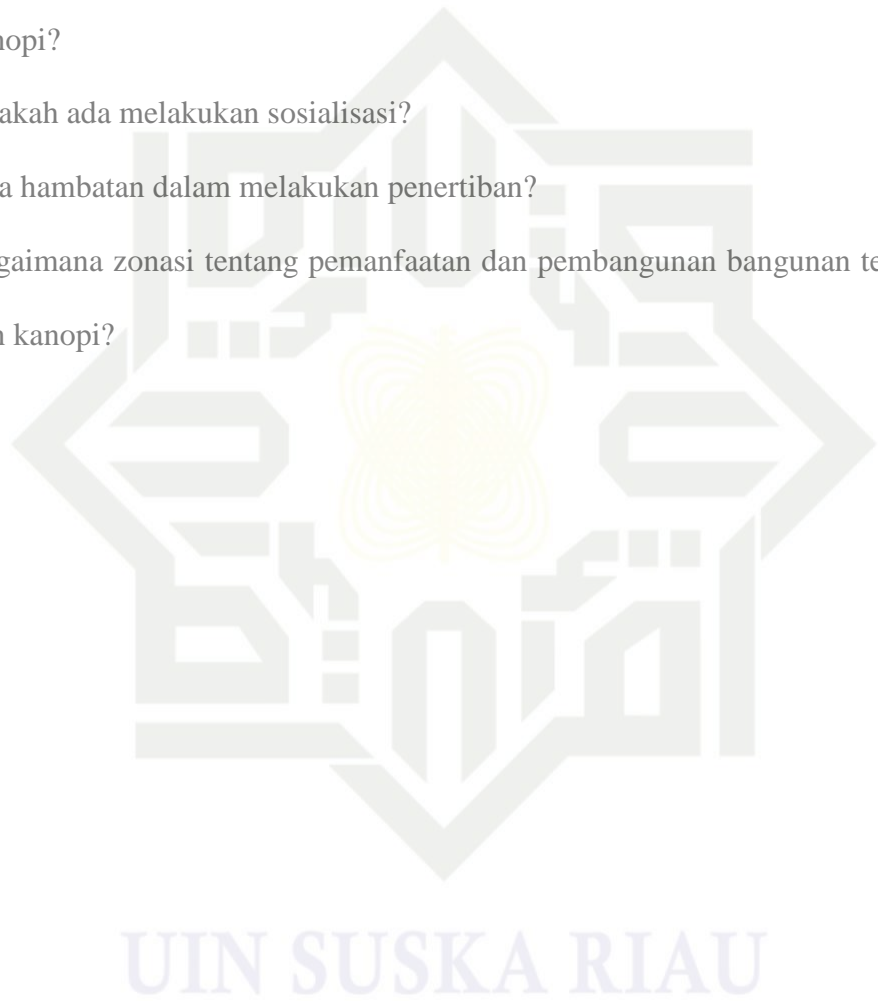


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Daftar Pertanyaan Kepala Bidang Dinas Pasar

1. Bagaimana tata cara penertiban penataan bangunan teras dan kanopi?
2. Siapa yang berwenang menertibkan tentang penataan bangunan teras dan kanopi?
3. Apakah ada melakukan sosialisasi?
4. Apa hambatan dalam melakukan penertiban?
5. Bagaimana zonasi tentang pemanfaatan dan pembangunan bangunan teras dan kanopi?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Wawancara Untuk Pemilik Toko Yang Ber Kanopi**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di kawasan pasar raya solok?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan walikota no.7 tahun 2018 tentang penataan bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan?
3. Apakah ada surat pemberitahuan tentang dilarang nya berjualan di bawah bangunan kanopi?
4. Apakah ada petugas datang memberitahukan mengenai dilarang nya berjualan dibawah bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan?
5. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan dinas pasar kota Solok mengenai dilarangnya berjualan dibawah bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan?
6. Apa saja bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan oleh satpol PP dan dinas pasar kota solok?



## Daftar wawancara untuk kepala bidang pada kantor satpol PP kota solok

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Sudah berapa lama pemberlakuan perwako Solok nomor 7 tahun 2018 ?
2. Bagaimana sistem penertiban terhadap pelaksanaan penataan bangunan teras dan kanopi?
3. Apakah ada surat peringatan yang diberikan kepada pemilik toko yang berjualan dibawah bangunan kanopi?
4. Apakah ada hambatan dalam penertiban penataan bangunan teras dan kanopi?
5. Apa saja bentuk hambatan tersebut?
6. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan terhadap pemberlakuan perwako solok nomor 7 tahun 2018?
7. Bagaimana bentuk sosialisasi tersebut?
8. Apakah masyarakat yang berjualan dibawah bangunan teras dan kanopi mengetahui adanya sosialisasi terhadap perwako solok nomor 7 tahun 2018?
9. Apakah sosialisasi tersebut mendapat perhatian dari para pedagang yang berjualan dikawasan pasar raya solok?
10. Bagaimana strategi satpol PP dalam melakukan penertiban tersebut?
11. Apa sanksi bagi pelanggar perwako solok no.7 tahun 2018?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Bapak Fera Zuana Selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok



Bersama Ibu Efi Zahara Selaku Kasi Pendataan Dan Penempatan Bidang Pasar Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Solok

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Bersama Pemilik Toko Yang Dilengkapi Bangunan Teras Dan Kanopi Di Kawasan Perdagangan Kota Solok

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Bangunan Kanopi Dan Teras Yang Dimanfaatkan Untuk Berjualan Dan Menempatkan Barang Dagangan Dikawasan Perdagangan Pasar Raya Solok

State Islamie University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrpsi dengan judul, "Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Dikawasan Perdagangan  
Pasar Raya Solok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018 " yang  
ditulis oleh :

Nama : SYAFRIANTI  
NIM : 11527203051  
Program Studi: ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 November 2019  
Waktu : Jam, 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
Erdaus, SH. MH  
Sekretaris  
Ilham Akbar, SH., MH  
Penguji I  
Nurhidayat, SH., MH  
Penguji II  
Asril, S. SH., MH

Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Erni, S. Sos., MM.**  
NIP. 19680226 199103 2 002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### SURAT KETERANGAN

Pengelelo Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: **SYAFRIANTI**

: **11527203051**

: **ILMU HUKUM**

: **PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DI KAWASAN PERDAGANGAN PASAR RAYA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2018**

Pembimbing : **Basir, S.HI, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 November 2019

An. Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

**NIP. 198804302019031010**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau No. 04/F.I/PP.00.9/5033/2019

Pekanbaru, 22 Mei 2019

: Bisa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAFRIANTI  
NIM : 11527203051  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : 1. Kepala Dinas Pasar Kota Solok  
2. Kepala Satpol PP Kota Solok

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Dikawasan Perdagangan Pasar Raya Solok

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diijazkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diijazkan mengemukakan dan mempergunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23181  
 TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 001/F.I/PP.00.9/5033/2019 Tanggal 22 Mei 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : SYAFRIANTI
2. NIM / KTP : 11527203051
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DI KAWASAN PERDAGANGAN PASAR RAYA SOLOK
7. Lokasi Penelitian : 1. DINAS PASARKOTA SOLOK  
 2. KANTOR SATPOL PP KOTA SOLOK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 24 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 668 - PERIZ/DPM&PTSP/VII/2019

Rekomendasi Penelitian

Meningkat : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Meningkat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23181 tanggal 24 Mei 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : SYAFRIANTI  
Tempat/Tanggal lahir : Batu Banyak/11 September 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Banda Baru Jorong Gobah  
Nomor Kartu Identitas : 1302065109960002  
Judul : Pelaksanaan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan Pasar Raya Solok  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pasar Kota Solok 2.Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok  
Jadwal penelitian : 3 Bulan (Juli - September 2018)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 9 Juli 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MASWAR DEDI, AP. M Si  
NIP. 19740618 199311 4001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritikan atau tinjauan suatu masalah.  
b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH KOTA SOLOK  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lubuk Sikarah No.89 ☎ (0755) 20084 EXT. 116, HP 082390361999

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 503/243/Rek.P/DPMPTSP/2019

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  6. Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok Untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan.
- 
1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  2. Bahwa sesuai dengan surat a.n Rektor Dekan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/5033/2019 tanggal. 22 Mei 2019 perihal **Mohon Izin Riset**;
  3. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5, 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Solok memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: Syafrianti
Tempat/Tanggal Lahir	: Batu Banyak, 11 September 1996
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Banda baru Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kec. Lembang Jaya Kab. Solok
Elektronik/Identitas No. BP	: 1302065109960002
Maksud	: Izin Riset
Judul/ Tentang	: Pelaksanaan Peraturan Walikota Solok No. 7 Tahun 2018 Tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Pasar Raya Solok
Lokasi Penelitian	: Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok, kantor Satpol PP
Waktu Penelitian	: 25 Juli 2019 s.d 25 September 2019
Anggota Penelitian	: 1 Orang

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud kerangka serta tujuan.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Instansi/Badan/Lembaga/Perusahaan yang dihubungi.
3. Melaporkan diri kepada Walikota Solok Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Solok setelah selesai melakukan penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu diharapkan kepada Instansi/Badan/Lembaga/Perusahaan dan Perorangan yang dihubungi dapat membantu seperlunya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerusan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM**  
 Jalan Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo, Telp. (0755) 20278 Fax (0755) 22542  
**SOLOK**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 511.3/ 37 /SK/DPKUKM/VII/2019

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SYAFRIANTI
NIM/KTP	: 11527203051
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1
Universitas	: UIN SUSKA RIAU

Telah melakukan penelitian pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok pada tanggal 26 Juli 2019 dengan judul : "Pelaksanaan Peraturan Walikota Solok No. 7 Tahun 2018 tentang Penataan Bangunan, teras, dan kanopi di Kawasan Pasar Raya Solok."

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solok , 26 Juli 2019

An. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM  
 Kasi Pendataan dan Penempatan



NIP. 196505051986032010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Syech Kukut No. 2 Kota Solok Telp. (0755) 21059 Solok



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 332/384/Pol PP dan Damkar 2019

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Solok, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : SYAFRIANTI  
 NIM/KTP : 11527203051  
 Program Study : ILMU HUKUM  
 Jenjang : S1  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Solok pada tanggal 30 Juli 2019 dengan judul : " Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Solok No.7 Tahun 2018 tentang Penataan Bangunan,Teras dan Kanopi di kawasan Pasar raya Solok".

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

UIN SUSKA RIAU Solok, 30 Juli 2019

A/n. Sekretaris Satuan Polisi Pamong  
 Praja dan Damkar Kota Solok



**IRFAN BIRAWA NEGARA S.Sos**  
 NIP. 196612311989031064



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Syafrianti dengan panggilan Anti, lahir di Batu Banyak pada tanggal 11 September 1996. Penulis merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara dari Ayahanda Risman dan Ibunda Endra Wati. Penulis menyelesaikan pendidikan SDN 17 Batu Banyak pada tahun 2009. Menyelesaikan pendidikan SMPN 4 lembang jaya pada tahun 2012. Menyelesaikan pendidikan SMAN 1 Bukit Sundi pada tahun 2015.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru melalui jalur SBMPTN, dan penulis diterima di Fakultas Syariah dan Hukum dengan mengambil Program Studi Ilmu Ilmu Hukum. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kejaksaan Negari Bagan Siapi Api bagian Pidana khusus ( PIDSUS ) Kabupaten Rohil dan penulis juga telah menyelesaikan Program Pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam. Penulis juga aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) ilmu hukum pada bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi dan kepengurusan anggota Himpunan mahasiswa islam (HMI) pada bidang Kewirausahaan.

Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan judul “ **Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Dikawasan Perdagangan Pasar Raya Solok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018**”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasah (*oral comprehensive*) pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 di Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau dan Alhamdulillah penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum ( SH ).